

PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONDOWOSO

Erna Haryanti Koestedjo

haryanti_erna@uwks.ac.id

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul Perencanaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso. Tujuan penelitian (1) Tersedianya hasil analisis terhadap permasalahan pengangguran. (2) Tersedianya hasil analisis terhadap pengembangan tenaga kerja. (3) Dirumuskannya perencanaan ketenagakerjaan yang bersifat terpadu lintas sektor.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Analisis Deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Beberapa metode analisis yang akan diterapkan didalamnya meliputi : Analisis Pohon Masalah (*Diagram of Tree*), Analisis Perkembangan Antar Waktu.

Hasil Penelitian ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 sebesar 2,44%, dengan trend menurun sejak tahun 2009. Penduduk yang bekerja sebanyak 97,56%, sebagian besar dengan tingkat pendidikan yang rendah, yaitu 73,57% hanya berpendidikan setingkat SD dan tanpa ijazah. Pengangguran terbuka menurun setiap tahunnya sebesar 6,34% pertahun. Penduduk dalam usia kerja di Kabupaten Bondowoso tahun 2014 sebanyak 631.218 jiwa, dengan 61,5% angkatan kerja dan 38,5% bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja telah bertumbuh 2,95% pertahun selama tahun 2009-2014, atau rata-rata bertambah 0,48% pertahun.

Kata kunci : Kebijakan, Ketenagakerjaan, Angkatan Kerja.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan. Pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan atau menambah lapangan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian, tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera. Program pembangunan ekonomi di masa lalu terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dengan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tidak tercapai. Hal ini merupakan pengalaman berharga dengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang besar yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Untuk meraih keuntungan bonus demografi, ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi : (1) penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung, (2) tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif, (3) ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang (*windows of opportunity*) yang akan datang, dan (4) menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja. Pengangguran terjadi antara lain disebabkan (1) tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Profil ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 759.122 jiwa, sebesar 83% atau 631.216 jiwa penduduknya berada pada usia kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bondowoso sebesar 2,44% atau 9.466 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 378.767 jiwa. Berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas penduduk yang bekerja tersebut berpendidikan rendah. Sebanyak 318.213 jiwa (84%) diantaranya berijazah paling tinggi setara tamat SMP/MTs. Sebanyak 60.554 jiwa (16%) berijazah SMA/MA dan Akademi/Perguruan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso membutuhkan langkah strategis melalui penyusunan perencanaan ketenagakerjaan yang terpadu lintas sektor. Hasil kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan dan kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan di masa yang akan datang.

Perumusan Masalah

Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan solusi di Kabupaten Bondowoso, adalah : 1) rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan sebagian besar penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, sehingga sulit bersaing dan terserap di pasar kerja formal; 2) meningkatnya potensi pengangguran karena adanya bonus demografi di masa depan; 3) masih bertumpunya sebagian besar lapangan kerja di sektor pertanian dan belum optimalnya sektor lain dalam penyerapan tenaga kerja; 4) belum adanya perencanaan ketenagakerjaan yang integratif di semua sektor pembangunan.

Tujuan Penelitian

1. Tersedianya hasil analisis terhadap permasalahan pengangguran.
2. Tersedianya hasil analisis terhadap pengembangan tenaga kerja.
3. Dirumuskannya perencanaan ketenagakerjaan yang bersifat terpadu lintas sektor.

Keluaran Kegiatan

1. Evaluasi hasil pembangunan urusan ketenagakerjaan;
2. Analisis terhadap permasalahan pengangguran;

3. Analisis terhadap pengembangan tenaga kerja;
4. Perencanaan Ketenagakerjaan integratif lintas sektor.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Ketenagakerjaan dalam Perekonomian

Di negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya sektor informal yang cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Jumlah pekerja atau yang bekerja di sektor informal inilah yang sulit dicatat dengan akurat.

Pasar tenaga kerja di Indonesia, bersifat dualistik. Lapangan kerja sektor modern atau formal dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional atau informal dengan jumlah tenaga kerja yang besar, berjalan secara bersamaan dalam perekonomian.

Jumlah tenaga kerja yang melimpah dan produktif merupakan modal pembangunan yang sangat penting. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan, selain modal dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena semua sektor pembangunan dapat berjalan efektif bila ketersediaan tenaga kerja dapat mengimbangi permintaan tenaga kerja.

Pengertian Ketenagakerjaan

Untuk menghindari bias pemahaman dalam kajian ketenagakerjaan, diperlukan pengertian yang sama mengenai tenaga kerja. Batasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003, dalam ketentuan umum pasal 1, sebagai berikut :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 - 65 tahun (usia produktif/usia kerja) yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Maka yang disebut tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan, dan telah memasuki usia kerja tersebut (*working age population*). Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun disebut dibawah usia kerja dan yang berumur lebih dari 65 tahun, dikategorikan penduduk non produktif. Tetapi dalam aturan ketenagakerjaan, batasan tenaga kerja adalah seseorang yang berusia diatas 18 tahun.

6. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.

Perencanaan Ketenagakerjaan Makro

Mengingat pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, maka pemerintah berkewajiban menetapkan dan menyusun perencanaan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 pasal 7. Dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 menjelaskan bahwa perencanaan tenaga kerja meliputi aspek mikro dan makro. Perencanaan tenaga kerja makro terdiri atas Perencanaan Tenaga Kerja nasional, Perencanaan Tenaga Kerja sektoral dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. Perencanaan Tenaga Kerja nasional digunakan sebagai acuan pembangunan ketenagakerjaan nasional, Perencanaan Tenaga Kerja sektoral digunakan sebagai acuan pembangunan tenaga kerja sektoral, dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah digunakan sebagai acuan pembangunan ketenagakerjaan daerah. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro merupakan perencanaan tenaga kerja instansional. Perencanaan Tenaga kerja Mikro dimaksudkan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia lingkup instansional dan mempunyai peranan dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 8 menyatakan bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang meliputi : a) penduduk dan tenaga kerja; b) kesempatan kerja; c) pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; d) produktivitas tenaga kerja; e) hubungan industrial; f) kondisi lingkungan kerja; g) pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan h) jaminan sosial tenaga kerja. Informasi ketenagakerjaan tersebut disediakan oleh pemerintah dan swasta.

Untuk melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 15 Tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/Xi/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Pada pasal 1, disebutkan bahwa Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.

METODOLOGI

Lokasi kegiatan Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan Bappeda Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sasaran dari kegiatan adalah para pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan ketenagakerjaan integratif lintas sektor.

Data yang akan digunakan dalam analisa ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Kedua jenis data tersebut berupa data-data sekunder berupa catatan, laporan, makalah maupun data yang terdapat di instansi pemerintah yang menyajikan studi terdahulu berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data yang telah dipublikasi atau diizinkan oleh SKPD untuk digunakan dalam kegiatan ini, yaitu data tahun 2012-2014. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : a) Kajian Pustaka/Hasil Penelitian; b) FGD (Focus Group Discussion); dan c) Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan selama 5 tahun terakhir.

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah **Analisis Deskriptif**, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang diolah untuk menggambarkan suatu kondisi penelitian tanpa bermaksud menguji hipotesis. Beberapa metode analisis yang akan diterapkan didalamnya meliputi: Analisis Pohon Masalah (Diagram of Tree), Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif.

ANALISIS RENCANA KETENAGAKERJAAN

Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam urusan ketenagakerjaan merupakan upaya memujudkan Misi Pembangunan ke-2 yaitu “Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan”, dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Strateginya dalam kurun waktu 2014-2018 adalah dengan memperluas kesempatan kerja.

Kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun kebijakan pembangunan yang dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Metode dan Materi Pelatihan Ketrampilan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
2. Kebijakan Pengembangan Jaringan Penempatan, Penyaluran Tenaga Trampil dan Perluasan Tenaga Kerja melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Bipartit melalui program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Peningkatan Kuantitas Daerah Tujuan (pemukiman transmigrasi) dan daerah asal, melalui program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Transmigrasi Lokal dan Regional. Fokus utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso saat ini adalah menangani isu-isu strategis bidang Ketenagakerjaan, yaitu : a) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka; b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah; c) Investasi di daerah masih rendah; d) Kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja lokal; e) Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar kerja; f) Kurangnya pendidikan dan pelatihan ketrampilan angkatan kerja; g) Kompetensi tenaga kerja atau pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; h) Tidak seimbang pertumbuhan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia; i) Rendahnya tenaga kerja atau pencari kerja terhadap peluang kerja di luar daerah domisili atau di luar negeri, dan j) Tingginya pengaruh budaya masyarakat lokal terhadap motivasi kerja ke luar daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan berbagai program/kegiatan pada tahun 2014 dengan tingkat pencapaian sebesar 89,84 atau Sangat Berhasil. Sejak tahun 2009 hingga 2013, pelaksanaan kegiatan pelatihan 33 jenis ketrampilan dan telah mampu melatih sebanyak 1.974 orang calon tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja antar negara dari Kabupaten Bondowoso, bekerja sebagai PLRT (penata laksana rumah tangga), pekerja (worker), operator mesin, dan karyawan di perusahaan kayu. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berijazah SD dan SMP sebesar 65,6% dan SMA/SMK/MA sebesar 34,3%.

Tenaga kerja AKD tercatat selama tahun 2009-2013 sebanyak 1.260 orang dengan penempatan di 21 lokasi kabupaten/kota, dengan jabatan sebanyak 21 jenis. Jabatan AKAD terbesar adalah pekerja perkebunan, operator produksi dan batubara, dan mandor proyek. Tenaga kerja AKL merupakan penempatan tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak 11.423 orang, dengan daerah kerja sebanyak 32 lokasi, dan jabatan bervariasi sebanyak 38 jenis. Sebagian besar tenaga kerja AKL dan AKD berijazah SD, dan SMA/SMK/MA.

Penempatan tenaga kerja lokal, antar daerah dan antar negara sebenarnya merupakan sebuah solusi bagi masalah rendahnya lapangan kerja di Kabupaten Bondowoso. Namun demikian, jumlahnya selama 5 tahun terakhir tidak signifikan dibandingkan angkatan kerja yang tersedia. Penyebabnya antara lain kurangnya penguasaan bahasa negara tujuan, rendahnya ketrampilan yang dikuasai, dan pengaruh budaya lokal yang tidak mendukung. Banyak tenaga kerja lebih memilih bekerja di dalam Kabupaten Bondowoso atau daerah yang dekat daripada merantau ke kota besar atau luar negeri.

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Terjadinya penduduk yang menganggur atau pengangguran karena penawaran (supply) tenaga kerja lebih besar daripada permintaan (demand) tenaga kerja. Penawaran atau ketersediaan tenaga kerja biasanya diukur melalui jumlah angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) dan sedang bekerja. Penduduk usia kerja yang tidak bekerja antara lain ibu rumah tangga, pelajar, dan

lain-lain penyebab). Sedangkan permintaan tenaga kerja adalah lapangan kerja yang tersedia.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 sebesar 20,26% artinya setiap 100 orang produktif menanggung beban ekonomi dari 20 orang yang belum produktif (usia kurang dari 15 tahun) dan yang tidak produktif lagi (usia lebih dari 64 tahun). Akan tetapi bila angka ketergantungan ini dibebankan pada angkatan kerja maka rasio ketergantungan menjadi 95,53%. Artinya setiap 100 orang yang bekerja sebenarnya menanggung beban 96 orang tidak produktif dan yang produktif tapi tidak bekerja.

Dari data ketenagakerjaan tersebut dapat diketahui juga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau Economic Activity Rate (EAR) yaitu persentase dari populasi, baik yang bekerja dan menganggur, yang mewakili besarnya jumlah pasokan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja, tanpa memandang status kerja mereka saat ini. Angka ini adalah ukuran tingkat keberhasilan ekonomi dalam melibatkan penduduk angkatan kerja dalam beberapa bentuk kegiatan produktif. Angka TPAK di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 sebesar 64,28%.

Perencanaan Ketenagakerjaan Integratif

Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam perencanaan ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso meliputi strategi utama dan pendukung, sebagai berikut :

Strategi Utama

- a. Penguatan pendidikan formal dan informal di pedesaan terutama bagi anak usia sekolah dan sekolah kejuruan dan keahlian.
- b. Peningkatan kualitas ketrampilan kerja di sektor industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- c. Peningkatan kualitas ketrampilan kerja di sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa.
- d. Optimalisasi penempatan tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia melalui kegiatan Job Fair dan perbaikan sistem antar kerja (Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- e. Optimalisasi jejaring informasi bursa kerja berbasis website antar Kabupaten/Kota, Bursa Kerja di SMK dan PT untuk mempercepat informasi dan mengoptimalkan pengisian lowongan kerja di dalam negeri.
- f. Mempercepat pembangunan BLK beserta sarana dan prasarannya, dan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk membentuk TUK (Tempat Uji Kompetensi) agar mutu lulusan BLK berkualitas dan diakui di pasar kerja.
- g. Peningkatan kegiatan penyuluhan, informasi syarat jabatan dan bursa kerja online ke SMA/SMK dan angkatan kerja, agar membantu pemahaman dan kesiapan tenaga kerja muda Kabupaten Bondowoso dalam persaingan kerja di pasar dalam negeri dan luar negeri. Meliputi kesiapan dalam aspek Pengetahuan (Knowledge), Ketrampilan (Skill), dan Sikap (Attitude) seperti bahasa asing, ketrampilan teknis

khusus (technical skill), pengetahuan administrasi perijinan kerja, dan sikap mau bekerja keras, ulet dan kreatif.

Strategi Pendukung

- Program Harmonisasi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan,
- Kerjasama kemitraan peningkatan lapangan kerja terutama antara pemerintah pusat dan daerah, antara stakeholder dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi yang menjalankan fungsi,
- Pembinaan program SKPD yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Peningkatan kualitas kompetensi calon tenaga kerja dari lulusan SMK di Kabupaten Bondowoso, sesuai jurusan/keahlian masing-masing, dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Rencana Ketenagakerjaan Integratif

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki tanggungjawab untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja masyarakat. Oleh karena itu rencana ketenagakerjaan disusun secara terpadu (integratif) lintas sektor pembangunan. Rencana tersebut berisi berbagai program dan kegiatan lintas sektor selama kurun waktu 2016-2018 yang terbagi dalam 2 bagian, sebagai berikut :

- Penyediaan lapangan kerja produktif baru hingga tahun 2018, yang bertujuan menampung angkatan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Termasuk didalamnya upaya penempatan tenaga AKL, AKD dan AKN, yang bertujuan memanfaatkan lowongan kerja yang tersedia dan peluang usaha yang prospektif.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja bagi angkatan kerja, yang bertujuan meningkatkan upah tenaga kerja dan kemampuan bersaing di pasar kerja dalam negeri dan luar negeri.

Tabel 1
Prioritas Program untuk penyediaan lapangan pekerjaan produktif (LKP)
Kabupaten Bondowoso, 2016-2018

Sektor	Program	SKPD	Estimasi LKP
Tahun 2016			
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Perluasan areal tanam kopi untuk ekspor di kawasan agropolitan 2.000 hektar	Dishutbun	10000
	Pelatihan TTG pengolahn kopi ekspor (40 kelompok).	Diskoperindag	200
	Peningkatan dan Pemasaran Kopi bagi kelompok tani	Dishutbun, Diskoperindag	120
	Peningkatan produksi hasil olahan ikan dan daging	Bapemas/KKP/Disnakan	300

Sektor	Program	SKPD	Estimasi LKP
	ternak di 5 Kecamatan sentra		
	Peningkatan produksi kerajinan anyaman bambu di 10 kecamatan sentra	Dishutbun, Disnakertrans	200
	Perluasan areal tanam padi dan palawija organik di 3 kecamatan	Disperta	500
	Pelatihan dan peningkatan produksi pupuk organik bagi kelompok tani	Disperta	100
	Pelatihan Wirausaha TTG pengolahan Hortikultura (buah dan sayur) di 6 kecamatan	Bapemas, Disnakertrans	120
	Mengembangkan pusat pembenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan	Disperta	20
Pertambangan dan Penggalian	Pelatihan skill tenaga kerja pertambangan (Panas bumi, gas alam)	Disnakertrans	200
Listrik, Gas dan Air	Penumbuhan Wirausaha baru Air Mineral Isi Ulang dan Keagenan Gas LPG, 20 Unit Usaha	Diskoperindag	40
Bangunan/Konstruksi	Peningkatan Kegiatan Proyek Padat Karya melalui dana desa	Kecamatan dan Desa	1000
	Pelatihan Skill Tenaga Kerja Bangunan (Batu, Kayu, Besi)	Disnakertrans	30
Industri Pengolahan, Perdagangan, Rumah Makan, Hotel	Pelatihan Wirausaha Kuliner di Perkotaan dan Kawasan Wisata	Disnakertrans	50
	Pelatihan Pramuwisata/Guide	Disnakertrans	50
	Pelatihan Manajemen Perhotelan	Disnakertrans	50
	Penumbuhan Pedagang dan Bisnis Kuliner baru	Diskoperindag	60
	Pendirian rumah kemas dan rumah pemasaran Agroindustri	Diskoperindag	100
Angkutan, Pergudangan,	Peningkatan dan Peremajaan Angkot dan	Dishub dan PU Bina Marga	100

Sektor	Program	SKPD	Estimasi LKP
Komunikasi	Angkudes untuk menunjang Pariwisata		
	Peningkatan kualitas dan perbaikan ruas jalan menuju kawasan agropolitan dan Wisata Gunung Ijen Raung	Dishub dan PU Bina Marga	100
	Optimalisasi Pelaksanaan system resi gudang kopi dan palawija	Diskoperindag	100
Jasa-jasa Masyarakat	Penumbuhan Wirausahawan dan Home industry baru bidang jasa (sablon, Laundry, Ticketing, Kios PPOB, dll)	Disnakertrans, Diskoperindag	100
	Pelatihan dan penempatan tenaga kerja lokal, antar daerah dan antar Negara	Disnakertrans	300
	Pelatihan Inkubator Bisnis Ekonomi Kreatif (Otomotif, Properti, Keuangan, Asuransi, Disain/Fotografi, Percetakan).	Disnakertrans, Diskoperindag	100
	Pelatihan Manajemen bagi tenaga kerja di sektor informal lainnya	Diskoperindag	100
Tahun 2017-2018			
Bangunan/Konstruksi	Peningkatan Kegiatan Proyek padat karya melalui dana desa	Kecamatan dan Desa	1500
	Pelatihan Skill tenaga kerja bangunan (Batu, Kayu, Besi)		70
Jasa-jasa Masyarakat	Pelatihan dan penempatan tenaga kerja lokal, antar daerah dan antar Negara	Disnakertrans	700
	Pelatihan Manajemen bagi tenaga kerja di sektor informal lainnya	Diskoperindag	200
Jumlah Lapangan Kerja Baru			18.000

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Pelaksanaan masing-masing kegiatan menyesuaikan dengan Rencana Kerja yang disusun oleh SKPD terkait. Sedangkan jumlah target penciptaan lapangan kerja produktif dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kegiatan yang ada. Aspek serapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi salah

satu pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan di setiap sektor dan SKPD.

Melalui deskripsi rencana kegiatan tersebut diatas, dapat diperkirakan adanya peningkatan lapangan kerja produktif di Kabupaten Bondowoso sebanyak 18.000 LPK dalam periode 2016-2018, atau rata-rata dapat dibuka lapangan kerja produktif baru untuk 6.000 orang setiap tahunnya. Jumlah ini dianggap mencukupi kebutuhan tenaga kerja karena angkatan kerja kabupaten tumbuh rata-rata 2.020 orang setiap tahunnya.

Fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang paling besar dalam mengatasi kekurangan lapangan kerja adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi ini dicerminkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi di masyarakat, baik yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat maupun difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di masyarakat dapat diharapkan adanya peningkatan pendapatan dan daya belinya. Peningkatan daya beli masyarakat tersebut akan bermanfaat dalam meningkatkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah ini. Selanjutnya, kenaikan daya beli masyarakat tersebut akan menarik investasi bisnis ke Kabupaten Bondowoso, yang berdampak membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Faktor budaya dan sikap calon tenaga kerja juga membutuhkan perhatian yang besar dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas di Kabupaten Bondowoso. Diperlukan peran dan kebersamaan antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan lembaga pendidikan agama atau pesantren untuk mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di masa depan. Sedangkan prioritas program untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagai berikut :

Tabel 2
Prioritas Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja dan Calon Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2016-2018

Sektor	Program	SKPD	Target	
Tahun 2016-2017				
Pertanian, Perkebunan, dan Kelembagaan Usahatani	Peningkatan Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija	Disperta	Hasil panen dan kesejahteraan petani dan omset pedagang sektor informal meningkat	
	Peningkatan Sistem dan Sumberdaya penyuluh pertanian	Kantor ketahanan pangan		
	Peningkatan Intensifikasi tanaman Perkebunan (kopi, kelapa, cengkeh, dan bambu)	Dishutbun		
	Peningkatan intensifikasi tanaman hortikultura (buah dan sayur)	Disperta		
	Tahun 2017-2018			
	Peningkatan Kualitas kopi bubuk dan kemasan untuk pasar antar daerah dan	Diskoperindag		

Sektor	Program	SKPD	Target
	ekspor		
	Peningkatan kualitas dan kelembagaan kelompok tani dan koperasi	Disperta/KKP	
Peternakan, Perdagangan, Kehutanan, dan Perikanan	Peningkatan Intensifikasi budidaya dan ternak (sapi,kambing,unggas)	Disnakkan	
	Pelatihan mutu produk pedagang sektor informal	Diskoperindag	Peningkatan penjualan dan pendapatan UKM
	Peningkatan kualitas produksi dan kemasan hasil olahan ikan, daging ayam dan sapi	Bapemas, Disnakkan	
	Peningkatan kualitas dan jenis produk kerajinan bambu	Dishutbun,Bapemas	
	Peningkatan usaha pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pelestarian hutan	Dishutbun, Disnakertrans	Peningkatan kualitas lingkungan hidup menunjang ketenagakerjaan
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama kesuburan lahan dan sumberdaya air di perdesaan	Badan Lingkungan Hidup dan PU Pengairan	
Tahun 2017-2018			
Industri Pengolahan, dan Perdagangan	Mempermudah perijinan Usaha untuk mendorong tumbuhnya UKM industri pengolahan/perdagangan	Diskoperindag	Meningkatkan produktifitas ekonomi dari industri
	Pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran bagi UKM Agroindustri	Diskoperindag	
	Fasilitasi akses pinjaman permodalan bagi Industri yang menyerap tenaga kerja	Bagian Perekonomian	
Peningkatan Kualitas Bukan Angkatan Kerja : Pelajar SMA/SMK/Aliyah 2016-2018			
Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi	Peningkatan akses jalan dan moda transportasi menuju sekolah SMA/SMK/MA	PU Cipta Karya dan Bina Marga	Peningkatan prestasi calon tenaga kerja baru
	Peningkatan sarana dan prasarana SMK dengan kompetensi Agribisnis dan Otomotif	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK/MA		

Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso (Erna Haryanti Koestedjo)

Sektor	Program	SKPD	Target
	Peningkatan Kualitas Lulusan SMA/SMK sesuai kompetensi keahlian dan ketrampilan	Dinas Pendidikan	Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Sikap Tenaga Kerja
	Peningkatan kualitas lulusan Madrasah Aliyah dan Pesantren	Kementrian Agama	
Peningkatan Ketrampilan Pendukung Kompetensi Tenaga Kerja	Peningkatan jumlah lembaga/kursus ketrampilan penunjang ketenagakerjaan	Dinas Pendidikan dan Disnakertrans	
	Peningkatan jumlah kelulusan program pelatihan BLK sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja	Disnakertrans	
	Meningkatkan penyebaran informasi kepada pelajar SMA/SMK tentang bursa kerja lokal melalui bursa kerja online	Disnakertrans	
	Peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi calon tenaga kerja antar Negara	LPK	
	Peningkatan kemampuan menggunakan computer bagi tenaga AKN dan AKD	LPK	
	Peningkatan kualitas lulusan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat	Disnakertrans	
	Sosialisasi kepada pelajar calon tenaga kerja tentang sikap dan budaya kerja di luar daerah	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Informasi Ketenagakerjaan	Pembentukan forum komunikasi ketenagakerjaan antara SMK/SMA/MA dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans, Dinas Pendidikan	

Sumber: Hasil Analisis, 2015

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 sebesar 2,44%, dengan trend menurun sejak tahun 2009. Penduduk yang bekerja sebanyak 97,56%, sebagian besar dengan tingkat pendidikan yang rendah, yaitu 73,57% hanya berpendidikan setingkat SD dan tanpa ijazah. Pengangguran terbuka menurun setiap tahunnya sebesar 6,34% pertahun.
2. Penduduk dalam usia kerja di Kabupaten Bondowoso tahun 2014 sebanyak 631.218 jiwa, dengan 61,5% angkatan kerja dan 38,5% bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja telah bertumbuh 2,95% pertahun selama tahun 2009-2014, atau rata-rata bertambah 0,48% pertahun. Jumlah penduduk usia kerja bertambah 75.456 jiwa atau 13,58%, atau bertambah 2,26% pertahun. Sehingga penduduk bukan angkatan kerja tumbuh lebih cepat daripada angkatan kerja sebanyak 64.507 jiwa atau 36,14% atau bertambah 6,02% pertahun. Fakta ini merupakan bonus demografi, yaitu banyak usia kerja yang bukan angkatan kerja akan menambah jumlah angkatan kerja secara signifikan dalam 5-10 tahun yang akan datang.
3. Pada tahun 2014, prosentase penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 60,66%. Sektor kedua terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, sebesar 14,48%. Sedangkan industri pengolahan menyediakan lapangan kerja 8,65% dan jasa kemasyarakatan 7,56% bagi penduduk yang bekerja. Keempat sektor tersebut menyediakan lapangan kerja 91,35%.
4. Status pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Bondowoso yang terbesar adalah pekerja bebas pertanian, yaitu 28,6%, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih berperan besar dalam menyediakan lapangan kerja. Status pekerjaan utama yang terbesar ke dua adalah berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebesar 21,6%. Kedua status pekerjaan utama tersebut mencakup 50,2% dari komposisi status pekerjaan penduduk, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.
5. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bondowoso sebanyak 40% berusia 30-49 tahun, dan 32% berusia 15-29 tahun, dan 28% berusia diatas 50 tahun. Penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja tumbuh sebesar 0,77% setiap tahun dalam periode tahun 2010-2014.
6. Pembangunan ketenagakerjaan bukan hanya memerlukan perhatian dan kepedulian pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja di masa depan.

Rekomendasi

1. Peningkatan pendidikan penduduk usia kerja, terutama angkatan kerjanya adalah strategi utama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso. Termasuk didalamnya peningkatan kualitas pelatihan ketrampilan

- dari BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menumbuhkan lembaga latihan kerja swasta.
2. Penyediaan lapangan kerja produktif, yang inklusif dan berkelanjutan adalah prioritas utama dalam perencanaan ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso tahun 2016-2018. Lapangan kerja produktif memberikan imbalan yang layak dan mampu mengentaskan kemiskinan, bersifat inklusif tanpa membedakan jenis kelamin dan lokasi, serta berkelanjutan untuk dilakukan oleh generasi selanjutnya.
 3. Peningkatan produktivitas calon tenaga kerja dimulai dari aspek pendidikan, terutama kompetensi kelulusan SMK dan didukung oleh kebijakan dan program lintas sektoral yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas ketenagakerjaan.
 4. Dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral agar perencanaan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal, terutama terkait dampak program di setiap SKPD terhadap peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja produktif. Sehingga program tidak hanya dibatasi oleh capaian kinerja utama masing-masing, namun terintegrasi dengan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
 5. Pembinaan ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari Dinas Pendidikan untuk secara bertahap merubah sikap dan budaya calon tenaga kerja untuk mau bekerja di luar Kabupaten Bondowoso sesuai lowongan dan kesempatan kerja yang tersedia.
 6. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas SMK negeri dan swasta dengan memberikan bantuan peralatan praktek kerja yang sesuai dengan kebutuhan kejuruan yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2013, Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Bondowoso.
- , 2012, Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Bondowoso.
- , Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bondowoso, 2012, Bappeda Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.
- , 2014. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.
- , 2014. Potensi Wilayah Kabupaten Bondowoso. Bappeda Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.
- , 2014. Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Bondowoso. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.

-----, 2013. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan*. Kantor Perburuhan Internasional. Jakarta.

-----, 2010. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/Xi/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro*. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Jakarta.

Tengko Sarimuda, RB dan Soekarnoto, 2014. *Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 - 2011*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIV, No. 2 Agustus 2014*.